

Pengaruh Tarif Pajak Progresif, Kualitas Pelayanan, Sanksi, Kesadaran, Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Desak Ayu Sriary Bhegawati¹, Yenny Verawati², Gusti Ayu Ratih Widyantri³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar
Email, desak.bhegawati@gmail.com

Abstract

One of the most serious problems for economic policy makers is boosting taxpayer compliance rates. Non-compliance in paying motor vehicle taxes is of course a problem every year in almost all districts in Bali. Taxpayer compliance is influenced by various factors, one of which is progressive tax. Progressive taxes are expected to increase regional revenues. In addition to progressive taxes, service quality, sanctions, awareness, and tax knowledge can also trigger an increase in regional income. This study aims to determine the effect of progressive tax rates, service quality, sanctions, awareness, and tax knowledge on motor vehicle taxpayer compliance. The population in this study were all taxpayers at the UPTD Services and Retribution of the Province of Bali in Denpasar City so that a sample of 100 taxpayers was obtained using accidental sampling data determination techniques. The data analysis technique used is multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that progressive tax rates have a negative effect on motor vehicle taxpayer compliance at the UPTD Service and Retribution of the Province of Bali and service quality, sanctions, awareness, and tax knowledge have a positive effect on motor vehicle tax compliance at the UPTD Service and Retribution Province of the Province. Bali. This research can provide information about progressive tax rates, service quality, sanctions, awareness, and tax knowledge of motor vehicle taxpayer compliance, because this can affect increasing local revenue.

Keywords: *Progressive Tax Rates, Service Quality, Sanctions, Awareness, And Tax Knowledge*

Abstrak

Salah satu masalah yang paling serius bagi para pembuat kebijakan ekonomi adalah meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Ketidakepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor tentu saja menjadi masalah setiap tahunnya di hampir seluruh kabupaten di Bali. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah pajak progresif. Pajak progresif diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah. Selain pajak progresif, kualitas pelayanan, sanksi, kesadaran, dan pengetahuan perpajakan juga dapat memicu peningkatan pendapatan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tarif pajak progresif, kualitas pelayanan, sanksi, kesadaran, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak di UPTD Pelayanan dan Retribusi Provinsi Bali di Kota Denpasar sehingga diperoleh sampel sebanyak 100 wajib pajak dengan menggunakan teknik penentuan data accidental sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tarif pajak progresif berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di UPTD Pelayanan dan Retribusi Provinsi Bali dan kualitas pelayanan, sanksi, kesadaran, dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor di UPTD Pelayanan dan Retribusi Provinsi Bali. Bali. Penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai tarif pajak progresif, kualitas pelayanan, sanksi, kesadaran, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, karena hal tersebut dapat mempengaruhi peningkatan pendapatan asli daerah.

Kata kunci: Tarif Pajak Progresif, Kualitas Pelayanan, Sanksi, Kesadaran, Dan Pengetahuan Pajak

1. Pendahuluan

UPTD Jasa serta Pungutan Wilayah Provinsi Bali Di Kota Denpasar butuh diawasi karena pada posisi ini tidak hanya jumlah alat transportasi bermotor yang tertera pada Subdit Pendaftaran serta Pengenalan (REGIDENT) alat transportasi bermotor sangat banyak dibanding dengan kabupaten atau kota di Bali, serta pula terjalin kasus yang lumayan kompleks semacam

misalnya terdapatnya harus pajak yang memasukkan kendaraannya tidak bersumber pada Kartu Ciri Masyarakat(KTP), namun dengan Pesan Penjelasan Alamat yang karakternya sedangkan alhasil susah ditemui kala harus pajak tidak taat dalam melakukan kewajibannya.

Tarif Pajak Liberal ialah peraturan terkini yang diaplikasikan semenjak tahun 2014, dengan impian bisa

tingkatkan Pemasukan Asli Wilayah(PAD) yang lumayan penting dalam bagan pembiayaan pembangunan yang dilaksanakan di Provinsi Bali. Tetapi, disisi lain aplikasi Pajak Liberal di Provinsi Bali hadapi hambatan semacam terdapatnya ketidakpatuhan para harus pajak buat melakukan kewajibannya, sebab harus pajak wajib melunasi pajak lebih besar dari amatan sebelumnya sebab aplikasi pajak liberal itu. Perda ini telah hadapi pergantian sebesar 2 kali. Pergantian awal diatur dalam Peraturan Wilayah No 1 Tahun 2015. Dalam Perda ini Pajak Liberal diresmikan bersumber pada Kartu Keluarga(KK). Pergantian kedua diatur dalam Peraturan Wilayah No 8 Tahun 2016. Terjalin pergantian subyek pada Pajak Liberal ialah didasarkan atas Kartu Ciri Penduduk(KTP). Pajak Liberal pula diberatkan pada harus pajak itu seluruhnya.

Pembayaran pajak bersifat Liberal ini dikenakan pada alat transportasi bermotor atas julukan serta tujuan yang serupa cocok Kartu Keluarga. Obyek pajak kena pajak liberal merupakan alat transportasi bermotor piringan hitam gelap ataupun individu dengan pemakaian buat konsumtif. Dengan pengenaan pajak alat transportasi bermotor Bayaran Liberal ini, owner alat transportasi bermotor individu hendak melunasi pajak lebih besar buat kepemilikan alat transportasi bermotor yang berikutnya. Aplikasi Bayaran Liberal diaplikasikan dengan tujuan buat kurangi kemacetan serta memencet jumlah alat transportasi bermotor di Provinsi Bali yang ditimbulkan oleh alat transportasi individu. Alibi periset memilah elastis ini sebab Pajak Liberal ialah peraturan terkini yang diaplikasikan semenjak tahun 2014 kemudian. Pajak liberal diberatkan pada harus pajak seluruhnya, hingga periset menyangka kalau Pajak Liberal sanggup pengaruhi tingkatan disiplin harus pajak. Aplikasi Pajak Liberal alat transportasi bermotor bukan cuma dikenakan pada alat transportasi cakra 4, namun pula alat transportasi cakra 2. Pemungutan pajak alat transportasi bermotor dicoba cocok dengan bertepatan pada yang tertera pada dikala pembelian. Diharapkan aplikasi pajak liberal hendak tingkatan pendapatan penguasa wilayah dari pajak alat transportasi bermotor(Nusnal serta Natalia, 2015).

Ketidakpatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor tentu saja menjadi permasalahan setiap tahunnya di Bali, terutama di Kota Denpasar. Peneliti memilah Kota Denpasar sebagai lokasi penelitian ini karena jumlah penduduk yang banyak dan tiap penduduk penduduk sebagian besar memiliki kendaraan bermotor lebih dari satu. Realisasi unit Wajib Pajak yang telah melaksanakan kewajibannya tidak selalu mencapai target secara keseluruhan, seperti yang dapat dilihat pada tahun 2019 pencapaian persentase pemungutan pajak sebesar 33,53 persen, di tahun 2020 pencapaian persentase pemungutan pajak sebesar 17,18 dan di tahun 2021 sebesar 23,04. Ini mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak untuk wajib pajak kendaraan bermotor di UPTD Pelayanan dan Retribusi

Daerah Provinsi Bali di Kota Denpasar masih rendah. Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di UPTD Pelayanan dan Retribusi Daerah Provinsi Bali perlu diteliti untuk membuktikan secara empiris apa yang menjadi permasalahan serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajaknya.

Theory of Planned Behavior (TPB)

Riset hal disiplin pajak bisa diamati dari bagian intelektual harus pajak (Feld and Frey, 2002). Amatan dalam ilmu jiwa hal aspek yang pengaruhi sikap disiplin pajak, salah satunya merupakan Theory of Planned Behavior (TPB). Filosofi ini menarangkan kalau sikap yang ditimbulkan oleh orang timbul sebab terdapatnya hasrat buat bersikap, sebaliknya timbulnya hasrat buat bersikap.

Pengaruh Tarif Pajak Progresif pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Liberal ialah peraturan terkini yang diaplikasikan semenjak tahun 2014, dengan impian bisa tingkatan Pemasukan Asli Wilayah(PAD) yang lumayan penting dalam bagan pembiayaan pembangunan yang dilaksanakan di Provinsi Bali. Tetapi, disisi lain aplikasi Pajak Liberal di Provinsi Bali hadapi hambatan semacam terdapatnya ketidakpatuhan para harus pajak buat melakukan kewajibannya, sebab harus pajak wajib melunasi pajak lebih besar dari amatan sebelumnya sebab aplikasi pajak liberal itu. Perda ini telah hadapi pergantian sebesar 2 kali. Pergantian awal diatur dalam Peraturan Wilayah No 1 Tahun 2015. Dalam Perda ini Pajak Liberal diresmikan bersumber pada Kartu Keluarga(KK). Pergantian kedua diatur dalam Peraturan Wilayah No 8 Tahun 2016. Terjalin pergantian subyek pada Pajak Liberal ialah didasarkan atas Kartu Ciri Penduduk(KTP). Pajak Liberal pula diberatkan pada harus pajak itu seluruhnya. Terus menjadi besarnya bayaran liberal yang diresmikan, bisa tingkatan disiplin harus pajak, sebab bila harus pajak telanjur dalam melunasi pajak hingga terus menjadi besar jumlah pajak yang wajib dibayarkan pada hari selanjutnya sebab dikenakannya kompensasi bersumber pada jumlah pajaknya ditambah lagi dengan dibebankannya bayaran liberal bila WP mempunyai alat transportasi lebih dari satu.

H1 = Tarif Pajak Progresif berpengaruh negatif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Kualitas Pelayanan pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Mutu jasa ialah akibat yang berarti kepada sikap disiplin dalam melunasi pajak. Jasa yang bagus kepada harus pajak ialah metode buat tingkatan kepatuhan harus pajak dalam melunasi peranan perpajakannya. Perasaan yang suka serta puas atas jasa yang bagus yang diserahkan oleh Penguasa ialah faktor yang memotivasi harus pajak buat taat yang kesimpulannya bisa tingkatan pendapatan Negeri itu sendiri(Palda serta Hanousek, 2002). Disiplin harus

pajak ditingkatkan ialah dengan metode tingkatkan mutu jasa itu sendiri dimana mutu jasa itu diserahkan oleh aparat pajak. Mutu jasa mempengaruhi positif kepada disiplin harus pajak dalam melunasi Pajak Alat transportasi Bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Denpasar. Perihal seragam pula dikatakan oleh (Lisa serta Supadmi, 2017), kalau mutu jasa mempengaruhi positif serta penting pada disiplin harus pajak dalam melunasi pajak alat transportasi bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Tabanan. Terus menjadi besar mutu jasa hingga hendak tingkatkan disiplin harus pajak.

H2 : Kualitas Pelayanan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Pengaruh Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Ganjaran perpajakan ialah pemeberian ganjaran untuk harus pajak yang tidak memenuhi kewajibannya cocok dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang legal. Tujuannya supaya peraturan perpajakan dipatuhi, hingga wajib terdapat ganjaran perpajakan untuk para pelanggannya. Bagi (Madiasmo, 2013: 47) melaporkan kalau ganjaran perpajakan ialah agunan kalau determinasi perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) hendak dituruti ataupun dipatuhi, ataupun dengan tutur lain perpajakan ialah perlengkapan pencegah dimana supaya para harus pajak tidak melanggar norma perpajakan. Ganjaran perpajakan ialah agunan kalau determinasi peraturan perundang-undangan perpajakan hendak dituruti ataupun dipatuhi (Mardiasmo, 2011). Mulari serta Ery (2011) mempelajari akibat anggapan mengenai ganjaran perpajakan serta pemahaman harus pajak pada disiplin peliputan harus pajak orang individu di Kantor Jasa Pajak Pratama Denpasar Timur kalau analisa anggapan harus pajak mengenai ganjaran perpajakan serta pemahaman harus pajak dengan cara persial mempengaruhi positif serta penting pada disiplin peliputan harus pajak orang individu di Kantor Jasa Pajak Pratama Denpasar Timur. Faudi serta Yeni (2013) mempelajari akibat mutu jasa aparat pajak, ganjaran perpajakan, bayaran disiplin pajak, pemahaman pajak serta wawasan pajak kepada disiplin harus pajak UMKM membuktikan kalau kualitas jasa serta ganjaran perpajakan mempengaruhi positif kepada disiplin harus pajak UMKM..

H3 : Sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajjak kendaraan bermotor.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Pemahaman harus pajak ialah kondisi dimana harus pajak mengetahui hendak berartinya pajak tanpa terdapatnya desakan dari pihak lain buat membayarkan pajaknya. Bagi Erawati & Parera (2017) harus pajak yang mempunyai pemahaman yang kecil hendak mengarah buat tidak melakukan peranan perpajakannya ataupun melanggar peraturan perpajakan yang legal. Statment itu searah dengan hasil riset itu, kalau sedang rendahnya pemahaman harus pajak buat membayarkan pajak alat transportasi bermotor. Pemahaman pajak

timbul kala harus pajak mempunyai wawasan serta sanggup memahai pajak dengan bagus, alhasil mendesak mereka dengan cara senang berkenan buat penuh peranan itu. Hasil riset ini tidak cocok dengan riset yang dicoba oleh Wardani & Rumiya (2017) serta Gadis & Asli (2013) hal pemahaman harus pajak mempengaruhi positif kepada disiplin harus pajak alat transportasi bermotor..

H4 : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Pengetahuan Pajak pada Kesadaran Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Wawasan pajak ialah perihal yang sangat pokok yang wajib dipunyai oleh harus pajak sebab tanpa terdapatnya wawasan mengenai pajak, hingga susah untuk harus pajak dalam melaksanakan peranan perpajakannya. Penguasa sudah melaksanakan usaha buat meningkatkan wawasan untuk para harus pajak, antara lain lewat konseling, iklan- iklan di alat era ataupun alat elektronik dengan tujuan supaya para harus pajak lebih gampang paham serta lebih kilat menemukan data perpajakan. Bagi Bidadari serta Rumiya (2017), wawasan pajak merupakan data yang jadi bawah untuk harus pajak yang dipakai buat berperan, menata strategi perpajakan serta mengutip ketetapan dalam menyambut hak serta peranan di aspek perpajakan. Hingga dari itu, disiplin harus pajak makin bertambah bila harus pajak mempunyai wawasan perpajakan. Sebab dengan harus pajak mengenali mengenai peranan serta ganjaran yang hendak diserahkan berarti harus pajak telah mempunyai wawasan pajak yang besar. Bersumber pada riset terdahulu (Cakoro, Susilo, serta Zahroh, 2015), mengatakan elastis wawasan perpajakan mempengaruhi positif kepada disiplin harus pajak..

H5 : Pengetahuan Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

2. Metode Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di UPTD Pelayanan dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kota Denpasar yang berlokasi di Jl. Cok Agung Tresna Nomor 1. Alasan dipilihnya lokasi ini karena UPTD Pelayanan dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kota Denpasar merupakan tempat pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kota Denpasar serta jumlah kendaraan bermotor yang terus meningkat tiap tahun ke tahun. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda.

Uji Statistik Deskriptif Responden

Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Penelitian ini membuktikan kalau 1) Tipe jenis kelamin untuk mengenali nisbah tingkatan

perbandingan kelamin yang jadi responden dalam riset ini. Hasil persentase responden dengan tipe kemaluan pegawai pria sebesar 71% serta wanita sebesar 29%. Baya dipakai buat mengenali nisbah tingkatan umur yang jadi responden dalam riset ini. Hasil persentase responden dengan baya 20- 30 tahun sebesar 47%, responden dengan baya 31- 40 tahun sebesar 35%, serta responden dengan baya 41- 50 tahun sebesar 18%. Profesi dipakai buat mengenali kerangka balik profesi harus pajak. Hasil persentase responden dengan profesi pegawai swasta sebesar 57, 0%, responden dengan profesi PNS sebesar 14%, serta responden dengan profesi wirausaha sebesar 29%.

Hasil percobaan normalitas dengan percobaan kolmogorov- smirnov membuktikan kalau angka Asymp. Sig(2- tailed) sebesar 0,200. Hasil itu membawa alamat kalau bentuk pertemuan regresi berdistribusi wajar sebab angka Asymp. Sig (2- tailed) 0, 200 lebih besar dari alpha 0, 05. Perihal ini berarti edaran informasi pada suatu golongan informasi ataupun elastis itu mempunyai edaran pola yang wajar ataupun terencana. Nilai tolerance dari elastis leluasa ialah bayaran pajak liberal, mutu jasa, ganjaran perpajakan, pemahaman harus pajak serta wawasan pajak sebesar 0, 10 serta angka $VIF \leq 10$, hingga bisa disimpulkan kalau tidak terjalin pertanda multikolinearitas. Perihal ini berarti kalau tidak ada hubungan yang besar ataupun sempurna antara elastis leluasa ataupun dalam bentuk regresi. Bersumber pada hasil analisa membuktikan kalau elastis bayaran pajak liberal mempunyai angka signifikansi sebesar 0, 080, mutu jasa mempunyai angka signifikansi sebesar 0, 340, ganjaran perpajakan mempunyai angka signifikansi sebesar 0, 053, pemahaman harus pajak mempunyai angka signifikansi sebesar 0, 841, wawasan pajak mempunyai angka signifikansi sebesar 0, 501, di mana angka itu 0,05 hingga bisa disimpulkan kalau tidak ada pertanda heteroskedastisitas. Perihal ini berarti tidak terjalin ketidaksamaan varians dari residual satu observasi ke observasi yang lain.

Pengujian Hipotesis

Tabel 1.1 Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized		Standardized		t	Sig.
	Coefficients		Coefficients			
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	1,710	1,148			1,490	0,140
TPP	-0,080	0,049	-0,123		-1,637	0,105
KP	0,194	0,059	0,280		3,281	0,001
SP	0,281	0,071	0,336		3,937	0,000
KsWP	0,147	0,058	0,197		2,545	0,013
PP	0,247	0,079	0,250		3,127	0,002

Sumber : Data Diolah, 2022

Berdasarkan Tabel 5.6 dapat ditulis persamaan regresi linier berganda sebagai berikut: $KWP = 1,710 - 0,080TPP + 0,194KP + 0,281SP + 0,147KsWP + 0,247PP$

3. Hasil dan Pembahasan

Pengaruh Tarif Pajak Progresif pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Anggapan awal melaporkan kalau bayaran pajak liberal mempengaruhi minus kepada disiplin harus pajak alat transportasi bermotor. Bersumber pada hasil percobaan regresi linear berganda membuktikan kalau bayaran pajak liberal tidak mempengaruhi kepada disiplin harus pajak alat transportasi bermotor, diamati dari angka thitung sebesar- 1, 637 dengan angka signifikansi 0, 105 dimana angka itu lebih besar dari 0, 05. Perihal ini membawa alamat kalau bayaran pajak liberal bukan ialah aspek berarti yang bisa pengaruhi disiplin harus pajak alat transportasi bermotor. Tarif pajak progresif bukan merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Tarif pajak progresif merupakan tarif pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak jika mempunyai kendaraan yang lebih dari satu dengan nama dan alamat yang sama. secara tidak langsung wajib pajak telah menyetujui jikan harus dikenakan tarif pajak progresif atas kendaraan bermotor yang dimiliki lebih dari 1, sehingga bagi wajib pajak tetap akan melakukan pembayaran pajak progresif sesuai dengan persyaratan yang telah di terapkan (Saraswati, dkk, 2022).

Pengaruh Kualitas Pelayanan pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Anggapan kedua melaporkan kalau mutu jasa mempengaruhi positif kepada disiplin harus pajak alat transportasi bermotor. Bersumber pada hasil percobaan regresi linear berganda membuktikan kalau mutu jasa mempengaruhi positif kepada disiplin harus pajak alat transportasi bermotor, diamati dari angka thitung sebesar 3, 281 dengan angka signifikansi 0, 001 dimana angka itu lebih kecil dari 0, 05. Mutu jasa ialah akibat yang berarti kepada sikap disiplin dalam melunasi pajak. Jasa yang bagus kepada harus pajak ialah metode buat tingkatkan kepatuhan harus pajak dalam melunasi peranan perpajakannya. Perasaan yang suka serta puas atas jasa yang bagus yang diserahkan oleh Penguasa ialah faktor yang memotivasi harus pajak buat taat yang kesimpulannya bisa tingkatkan pendapatan Negeri itu sendiri(Palda serta Hanousek, 2002). Disiplin harus pajak ditingkatkan ialah dengan metode tingkatkan mutu jasa itu sendiri dimana mutu jasa itu diserahkan oleh aparat pajak. Petugas pajak dituntut buat membagikan jasa yang ramah, seimbang, serta jelas tiap dikala pada harus pajak yang melunasi pajak itu. Mutu Jasa yang bagus pula hendak membagikan kenyamanan untuk harus pajak. Keramah tamahan

aparatus pajak serta keringanan dalam sistem data perpajakan tercantum dalam jasa perpajakan itu..

Pengaruh Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Anggapan ketiga melaporkan kalau ganjaran perpajakan mempengaruhi positif kepada disiplin harus pajak alat transportasi bermotor. Bersumber pada hasil percobaan regresi linear berganda membuktikan kalau ganjaran perpajakan mempengaruhi positif kepada disiplin harus pajak alat transportasi bermotor, diamati dari angka thitung sebesar 3,937 dengan angka signifikansi 0,000 dimana angka itu lebih kecil dari 0,05. Ganjaran perpajakan ialah agunan kalau determinasi peraturan perundang-undangan perpajakan hendak dituruti ataupun dipatuhi (Mardiasmo, 2011). Ganjaran perpajakan diberlakukan buat membagikan ganjaran untuk harus pajak yang tidak penuhi kewajibannya cocok dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang legal. Tujuannya supaya peraturan perpajakan dipatuhi, hingga wajib terdapat ganjaran perpajakan untuk para pelanggannya. Bagi (Madiasmo, 2013: 47) melaporkan kalau ganjaran perpajakan ialah agunan kalau determinasi peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) hendak dituruti ataupun dipatuhi, ataupun dengan tutur lain perpajakan ialah perlengkapan pencegah dimana supaya para harus pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Anggapan keempat melaporkan kalau pemahaman harus pajak mempengaruhi positif kepada disiplin harus pajak alat transportasi bermotor. Bersumber pada hasil percobaan regresi linear berganda kalau pemahaman harus pajak mempengaruhi positif kepada disiplin harus pajak alat transportasi bermotor, diamati dari angka thitung sebesar 2,545 dengan angka signifikansi 0,013 dimana angka itu lebih kecil dari 0,05. Pemahaman harus pajak ialah kondisi dimana harus pajak mengetahui hendak berartinya pajak tanpa terdapatnya desakan dari pihak lain buat membayarkan pajaknya. Bagi Erawati & Parera (2017) harus pajak yang mempunyai pemahaman yang bagus hendak mengarah buat melakukan peranan perpajakannya ataupun tidak melanggar peraturan perpajakan yang legal. Pemahaman harus pajak ialah guna perpajakan selaku pembiayaan negeri amat dibutuhkan buat tingkatkan disiplin harus pajak. Pemahaman pajak timbul kala harus pajak mempunyai wawasan serta sanggup memahai pajak dengan bagus, alhasil mendesak mereka dengan cara senang berkenan buat penuhi peranan itu (Arum serta Zulaikha, 2012).

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Anggapan kelima melaporkan kalau wawasan perpajakan mempengaruhi positif kepada disiplin harus

pajak alat transportasi bermotor. Bersumber pada hasil percobaan regresi linear berganda membuktikan kalau wawasan perpajakan mempengaruhi positif kepada disiplin harus pajak alat transportasi bermotor, diamati dari angka thitung sebesar 3,127 dengan angka signifikansi 0,002 dimana angka itu lebih kecil dari 0,05. Wawasan pajak ialah perihal yang sangat pokok yang wajib dipunyai oleh harus pajak sebab tanpa terdapatnya wawasan mengenai pajak, hingga susah untuk harus pajak dalam melaksanakan peranan perpajakannya. Penguasa sudah melaksanakan usaha buat meningkatkan wawasan untuk para harus pajak, antara lain lewat konseling, iklan-iklan di alat era ataupun alat elektronik dengan tujuan supaya para harus pajak lebih gampang paham serta lebih kilat menemukan data perpajakan. Bagi Bidadari serta Rumiya (2017), wawasan pajak merupakan data yang jadi bawah untuk harus pajak yang dipakai buat berperan, menata strategi perpajakan serta mengutip ketetapan dalam menyambut hak serta peranan di aspek perpajakan. Hingga dari itu, disiplin harus pajak hendak bertambah bila harus pajak mempunyai wawasan perpajakan. Sebab dengan harus pajak mengenali mengenai peranan serta ganjaran yang hendak diserahkan berarti harus pajak telah mempunyai wawasan pajak yang tinggi.

4. Kesimpulan

Bersumber pada hasil analisa informasi, bisa disimpulkan hasil riset selaku selanjutnya: Bayaran pajak liberal tidak mempengaruhi kepada disiplin harus pajak alat transportasi bermotor pada Kantor Bersama Samsat Denpasar. Dalam perihal ini, harus pajak telah mengenali efek yang hendak mereka dapat bila mempunyai alat transportasi bermotor lebih dari 1 hendak dikenakan pajak liberal cocok dengan bentuk atau tipe kendaraan yang harus pajak punya, alhasil pajak liberal tidak sanggup pengaruh tingkatkan disiplin harus pajak. Mutu jasa mempengaruhi positif kepada disiplin wajib pajak alat transportasi bermotor pada Kantor Bersama Samsat Denpasar, alhasil terus menjadi besar mutu jasa hingga hendak tingkatkan disiplin harus pajak. Ganjaran perpajakan mempengaruhi positif kepada disiplin harus pajak alat transportasi bermotor pada Kantor Bersama Samsat Denpasar. Ganjaran perpajakan diberlakukan buat membagikan ganjaran untuk harus pajak yang tidak penuhi kewajibannya cocok dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang legal, alhasil terus menjadi besar ganjaran perpajakan hingga hendak tingkatkan disiplin harus pajak. Pemahaman harus pajak mempengaruhi positif kepada disiplin harus pajak alat transportasi bermotor pada Kantor Bersama Samsat Denpasar. Pemahaman harus pajak ialah kondisi dimana harus pajak mengetahui hendak berartinya pajak tanpa terdapatnya desakan dari pihak lain buat membayarkan pajaknya, alhasil terus menjadi bertambah pemahaman harus pajak hingga hendak tingkatkan disiplin harus pajak. Wawasan perpajakan

mempengaruhi positif kepada disiplin harus pajak alat transportasi bermotor pada Kantor Bersama Samsat Denpasar. Wawasan pajak ialah perihal yang sangat pokok yang wajib dipunyai oleh harus pajak sebab tanpa terdapatnya wawasan mengenai pajak, hingga susah untuk harus pajak dalam melaksanakan peranan perpajakannya, alhasil terus menjadi bagus wawasan perpajakan hingga hendak tingkatkan disiplin harus pajak.

Daftar Rujukan

- [1] Agustini, I.G.A. Pratama. 2008. Pengaruh Norma Subjektif, Kewajiban Moral dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Denpasar Barat (Studi Kasus Pada Perusahaan Konstruksi di Kota Denpasar). Skripsi. Sarjana Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Udayana Denpasar.
- [2] Ajzen, I., 1991. The Theory of Planned Behaviour, In: Organizational Behaviour and Human Devision Process. Amhcrat, MA: Eloevior. 20 170-211.
- [3] Ananda, P. R. D. (2015). Pengaruh sosialisasi perpajakan, tarif pajak, dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi pada UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak di kantor pelayanan pajak pratama Batu) (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- [4] Andini, A. A. I. Y., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Biaya Kepatuhan, Sanksi Perpajakan, dan Penerapan E-Samsat Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kecamatan Bangli. KARMA (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi), 1(2), 391-397.
- [5] Anggreni, I. A. N. S., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Desa Abiansemal Pada Masa Covid'19. KARMA (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi), 1(2), 499-505.
- [6] Aprilliyana, Putri (2017) Pengaruh tarif pajak, kesadaran dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor Studi Pada WPOP Samsat Kota Surakarta. Skripsi. Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- [7] Astari, K. W., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak, Kebijakan Pajak, Dan Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung. Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA), 4(1), 400-410.
- [8] Atarwaman, R. J. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Akuntansi, 6(1), 39-51.
- [9] Azary, V., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2022). Pengaruh Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perpajakan, Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PPh Pasal 25 Badan Di KPP Pratama Denpasar Timur. Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA), 4(2), 280-288.
- [10] Bayu Cakoro, Heru Susilo dan Zahroh Z.A (2015). pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak. Jurnal Perpajakan (JEJAK), Vol.1, No.1.
- [11] Bhegawati, D. A. S., & Dicriyani, N. L. G. M. (2021). Tax Reporting Compliance During Covid-19 Time In Dalang Village. Academy of Accounting and Financial Studies Journal, 25, 1-11.
- [12] Bhegawati, D. A. S., Yuesti, A., & Yani, N. K. O. Y. B. 2022. Quality Administration Moderates Individual Duty Installment Consistence at Gianyar's Primary Tax Service Office.
- [13] Bhegawati, D. A. S., Yuesti, A., & Sumiantari, N. W. (2022). Analisis Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gianyar. Asian Journal of Management Analytics, 1(1), 35-50.
- [14] Boediono. 2003. Pelayanan Prima Perpajakan. PT. Rineka Cipta: Jakarta.
- [15] Cahyani, N. M. M. A., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi Pada Masa Covid-19 (Studi Pada Desa Padangsambian Kaja). KARMA (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi), 1(5), 1495-1505.
- [16] Chau, Liung. 2009. A Critical Review of Fisher Tax Compliance Model (A Research Syntesis). Journal of Accounting and Taxation, 1 (2), pp: 34- 40.
- [17] Danarsi, S. N., & Subroto, H. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Mobil Dengan Diberlakukannya Pajak Progresif Di Kota Surakarta. Jurnal Akuntansi Dan Pajak, 18(01).
- [18] Danarsi, S. N., & Subroto, H. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Mobil Dengan Diberlakukannya Pajak Progresif Di Kota Surakarta. Jurnal Akuntansi Dan Pajak, 18(01).
- [19] Danuta, A, Nitecki. 1997. Measuring Service Quality. Journal of Marketing. Associate University Librarian, Yale University Library.
- [20] Devi, S. A. P. P. (2017). Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Pajak Kendaraan Bermotor Tarif Progresif Terhadap Daya Beli Konsumen Kendaraan di Denpasar. 18(2017), 674-704. Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/25424/16974>.
- [21] Devano, Sony, Siti Kurnia Rahayu. 2006. Perpajakan Konsep, Teori, dan Isu. Jakarta: Prenade Media Group.
- [22] Dewi, N. P. Y. Y., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2022). Pengaruh Biaya Kepatuhan Pajak, Tingkat Penghasilan Wajib Pajak, Pengetahuan Peraturan Perpajakan, Sosialisasi Pajak Dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA), 4(3), 216-226.
- [23] Dharma, G. P. E. (2014). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PKB Dan BBNKB. E-Jurnal Akuntansi, 8(2), 340-353.
- [24] Doran, Michael. 2009. Tax Penaltie and Tax Compliance. Harvard Journal On Legislation Vol. 46, page : 111-161.
- [25] Erawati, T., & Pelu, G. M. M. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Self Assesment System, E-Filing Dan Sanksi Pajak Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta). AKURAT| Jurnal Ilmiah Akuntansi FE UNIBBA, 12(3), 74-83.
- [26] Lende, A., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2021). Pengaruh Kemanfaatan Npwp, Kualitas Pelayanan, Pemahaman Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kecamatan Gianyar. Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA), 3(1).
- [27] Paramitha, I. G. A. P. R., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2022). Pengaruh Pajak Progresif, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Kewajiban Moral, Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Bersama Samsat Denpasar. Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA), 4(3), 205-215.
- [28] Sadhani, N. W. Y. S., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. A. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Tentang Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan terhadap Pelaksanaan Program Tax Amnesty Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Batubulan. KARMA (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi), 1(3), 932-942.
- [29] Santiari, N. M. W., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2020, November). Effect of Access to Tax, Facilities, Knowledge of Tax, Socialization Tax, and Level of Understanding of Tax on Level of Compliance with Taxpayers in Tax Payment of Motorcycle Vehicles in Samsat Office Karangasem. In Proceeding 1st International Conference of Innovation on

- Science and Technology for Sustainable development (ICISTSD) 2020 (Vol. 1, No. 1, pp. 205-214).
- [30] Sugiyani, I. G. A. A., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2022). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung. KARMA (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi), 2(1), 2389-2395.
- [31] Sulistyari, P. I., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pengawasan, Konsultasi Account Representative, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Badung Selatan. Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA), 4(2), 289-300.
- [32] Trisnayanti, N. K. F., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2022). Pengaruh Kesadaran, Sanksi Pajak, Manajemen Pajak, Administrasi Pajak, Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Tabanan. Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA), 4(1), 411-419.
- [33] Wati, N. N. M. A., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. A. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Tarif Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Kota Tabanan. Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA), 3(3), 349-358.
- [34] Wijana, I. M. D., Yuesti, A., Bhegawati, D. A. S., & Mega, K. E. (2021). Tax Sanctions In Paying Land And Building Taxes. Journal of Contemporary Issues in Business and Government. Vol. 27(1).
- [35] Yanti, K. E. M., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2021). Pengaruh NJOP, Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan SPPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi Di Kecamatan Denpasar Utara. Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA), 3(1).
- [36] Yuesti, A., Prananta, N. G. W., & Bhegawati, D. A. S. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi. Media Akuntansi Perpajakan, 7(1), 7-18.